

**POLITIK DINASTI PADA STRUKTURAL LEMBAGA NEGARA:  
ANALISIS TERHADAP DEMOKRASI DI INDONESIA**

**Wulandari Ayuningsih<sup>1</sup>, Ridho Ramadhinnov<sup>2</sup>, Hafidz Lukman Hakim<sup>3</sup>, Rizka Mufidah Sari<sup>4</sup>, Shandya Alonso Eka Renanda<sup>5</sup>**

[wulandariayyyu@gmail.com](mailto:wulandariayyyu@gmail.com)<sup>1</sup>, [ridhoramadhinnov@gmail.com](mailto:ridhoramadhinnov@gmail.com)<sup>2</sup>, [hafidzlukmanhakim@gmail.com](mailto:hafidzlukmanhakim@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[rizkamufidahsari21@gmail.com](mailto:rizkamufidahsari21@gmail.com)<sup>4</sup>, [alonsoshandya467@gmail.com](mailto:alonsoshandya467@gmail.com)<sup>5</sup>

**Universitas Tidar**

**Abstrak**

Fenomena yang terjadi pada Demokrasi dan struktur lembaga negara, khususnya politik dinasti Indonesia telah menjadi hal yang menarik. Tujuan dari jurnal ini adalah untuk melihat bagaimana budaya politik dinasti memengaruhi demokrasi di Indonesia, serta bagaimana peran yang dimainkan oleh lembaga negara, partai politik, masyarakat sipil, dan media dalam mencegah dan menghentikan praktik-praktik ini. Pada penelitian ini mengidentifikasi bagaimana politik dinasti dapat merusak prinsip-prinsip demokrasi yang transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Budaya politik dinasti cenderung memperkuat oligarki dan mengurangi kepercayaan publik terhadap proses demokrasi. Hal ini didasarkan melalui pendekatan kualitatif dan analisis data sekunder. Kemudian lembaga negara dan partai politik sangat penting dalam membuat peraturan yang kuat untuk membatasi praktik politik dinasti. Selain itu, masyarakat sipil dan media bertanggung jawab untuk meningkatkan kesadaran publik tentang pelanggaran demokrasi dan mengawasinya. Jurnal ini menyimpulkan bahwa untuk membangun sistem demokrasi Indonesia yang lebih baik dan berkelanjutan, semua pemangku kepentingan harus bekerja sama untuk mewujudkan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

**Kata Kunci:** Politik Dinasti, Demokrasi, Lembaga Negara.

**Abstract**

*The phenomenon that occurred in Democracy and the structure of state institutions, especially the politics of the Indonesian dynasties, has become an interesting thing. The purpose of this journal is to look at how dynastic political culture affects the quality of democracy in Indonesia, as well as how the role played by state institutions, political parties, civil society, and the media in preventing and stopping these practices. This study identifies how dynastic politics can undermine the democratic principles of transparency, accountability, and community participation. Dynastic political culture tends to strengthen oligarchs and reduce public trust in the democratic process. This is based on a qualitative approach and secondary data analysis. Then state institutions and political parties are very important in making strong regulations to limit the practice of dynastic politics. In addition, civil society and the media are responsible for raising public awareness of violations of democracy and monitoring them. The journal concludes that to build a better and sustainable Indonesian democratic system, all stakeholders must work together to realize a government from the people, by the people, and for the people.*

**Keywords:** *Dynasty Politics, Democracy, State Institutions.*

**PENDAHULUAN**

**1. Latar Belakang**

Demokrasi adalah sebuah sistem pemerintahan yang ideal, di mana kekuasaan berasal dari rakyat untuk rakyat. Namun, dalam prakteknya demokrasi di Indonesia masih menghadapi beberapa tantangan, salah satunya adalah praktik politik dinasti. Politik dinasti

adalah fenomena di mana kekuasaan dan posisi penting dalam pemerintahan diwariskan dari generasi ke generasi dalam satu keluarga atau kelompok tertentu. Fenomena ini dapat memiliki dampak signifikan terhadap kualitas demokrasi di Indonesia.

Politik dinasti di Indonesia bukanlah hal baru. Praktik ini sudah terjadi sejak era reformasi dan bahkan cenderung berkembang seiring dengan waktu. Banyak anggota keluarga dari pejabat politik atau tokoh berpengaruh yang ikut terjun dalam dunia politik, baik sebagai calon legislatif, kepala daerah, maupun tokoh partai politik. Keberadaan politik dinasti ini menimbulkan sejumlah permasalahan, salah satunya adalah konsolidasi demokrasi yang menjadi terhambat karena adanya kecenderungan pengendalian kekuasaan oleh kelompok tertentu. Hal ini dapat memunculkan ketidakadilan dalam kompetisi politik, di mana individu-individu yang memiliki koneksi dan sumber daya besar bisa dengan mudah meraih kekuasaan, mengabaikan prinsip kompetisi yang adil dan

Untuk memahami sepenuhnya pengaruh budaya politik dinasti terhadap kualitas demokrasi di Indonesia, perlu dilakukan evaluasi yang komprehensif. Evaluasi ini harus melihat bagaimana keberadaan dinasti politik mempengaruhi proses demokratis, transparansi, dan akuntabilitas di tingkat lokal. Data yang dikumpulkan dari berbagai daerah di Indonesia yang memiliki sejarah kuat dinasti politik akan membantu menyoroti kasus-kasus nyata dan implikasinya terhadap integritas demokrasi.

Selain itu, penting juga untuk memahami peran lembaga-lembaga negara, partai politik, masyarakat sipil, dan media dalam upaya mencegah dan menanggulangi praktik politik dinasti. Lembaga negara dapat membuat regulasi yang efektif untuk mencegah nepotisme dan kronisme. Partai politik harus melakukan seleksi calon pemimpin yang transparan dan objektif untuk memilih individu yang kompeten sebagai wakil rakyat. Masyarakat sipil harus terlibat aktif dalam proses demokratis dengan meningkatkan kesadaran publik tentang dampak negatif dari politik dinasti. Media berfungsi sebagai platform untuk mengungkap praktik korupsi dan nepotisme terkait dengan politik dinasti.

Untuk mengatasi praktik politik dinasti yang merugikan demokrasi, perlu adanya koordinasi efektif antara lembaga negara, partai politik, masyarakat sipil, dan media. Dalam hal ini dapat diketahui bagaimana peran masing-masing elemen tersebut dalam upaya mencegah dan menanggulangi praktik politik dinasti.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian kualitatif yang digunakan dalam studi ini berfokus pada analisis politik dinasti dalam konteks lembaga negara di Indonesia dan dampaknya terhadap demokrasi. Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif deskriptif, yang memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi fenomena politik dinasti secara mendalam dan memahami implikasinya terhadap struktur kekuasaan dan partisipasi politik masyarakat.

Metode ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan perspektif yang beragam mengenai praktik politik dinasti dan dampaknya terhadap proses demokrasi di Indonesia. Wawancara ini diharapkan dapat mengungkapkan pandangan subjektif dan pengalaman langsung dari individu yang terlibat dalam sistem politik, sehingga memberikan wawasan yang lebih kaya dan kontekstual (Gunanto, 2020; Heriyanto, 2022; Sembiring & Simanihuruk, 2018). Selain wawancara, penelitian ini juga menggunakan teknik observasi partisipatif untuk mengamati dinamika politik di lapangan, terutama dalam konteks pemilihan kepala daerah dan rekrutmen politik. Observasi ini penting untuk memahami bagaimana politik dinasti beroperasi dalam praktik dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi interaksi antara pemilih dan kandidat (Hafsari et al., 2022; Setyaningrum & Saragih, 2019).

Penelitian ini juga melibatkan analisis dokumen, termasuk produk hukum, laporan

media, dan publikasi akademik yang relevan untuk memberikan konteks yang lebih luas tentang fenomena politik dinasti dan dampaknya terhadap demokrasi (Gunanto, 2020; Darmansyah et al., 2020). Selanjutnya, analisis data dilakukan dengan menggunakan pendekatan analisis wacana untuk memahami bagaimana narasi politik dinasti dibangun dan dipertahankan dalam diskursus publik. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi bagaimana bahasa dan simbol digunakan untuk membenarkan atau menolak praktik politik dinasti, serta bagaimana hal tersebut mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap demokrasi (Karman, 2016). Dengan cara ini, penelitian ini tidak hanya berfokus pada deskripsi fenomena, tetapi juga pada makna dan implikasi yang lebih dalam dari praktik politik dinasti dalam konteks demokrasi di Indonesia.

Melalui kombinasi metode wawancara, observasi, dan analisis dokumen, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang politik dinasti di Indonesia dan dampaknya terhadap struktur lembaga negara serta partisipasi politik masyarakat. Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman tentang tantangan yang dihadapi dalam memperkuat demokrasi di Indonesia, terutama dalam konteks dominasi politik oleh dinasti tertentu (Heriyanto, 2022; Setyaningrum & Saragih, 2019; Darmansyah et al., 2020).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Pengaruh budaya politik dinasti terhadap kualitas demokrasi di Indonesia?**

Budaya politik dinasti merupakan fenomena yang masih berkembang di Indonesia dan memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas demokrasi di negara ini. Dinasti politik didefinisikan sebagai kekuasaan politik yang diwariskan atau dijalankan oleh keluarga atau kelompok tertentu dalam jangka waktu yang lama. Budaya ini berkembang di berbagai daerah di Indonesia, di mana anggota keluarga petahana, seperti anak, istri, atau saudara, sering kali meneruskan kekuasaan politik, baik di tingkat daerah maupun nasional. Fenomena ini sering kali mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi, seperti pemilihan yang terbuka dan adil, dan pada akhirnya dapat merusak proses demokrasi di Indonesia. Pengaruh budaya politik dinasti dalam konteks demokrasi bisa sangat kompleks, karena melibatkan dinamika kekuasaan, pengaruh sosial, serta pemanfaatan sumber daya untuk mempertahankan dominasi politik keluarga (Maulia, 2024).

Pengaruh budaya politik dinasti terhadap kualitas demokrasi di Indonesia seringkali terlihat dalam proses pemilihan umum. Dinasti politik cenderung menguasai daerah tertentu sehingga menciptakan lingkungan politik yang tidak kompetitif dan monopolistik. Hal ini berdampak negatif pada peluang kandidat dari luar keluarga dinasti untuk berpartisipasi secara adil dalam pemilihan. Dengan mendominasi ruang politik, dinasti politik juga dapat menghalangi kesempatan bagi warga negara yang memiliki kualitas dan kemampuan untuk terlibat dalam proses pemerintahan. Akibatnya, pemilihan umum kehilangan esensinya sebagai mekanisme demokratis yang memungkinkan perubahan dan representasi yang sejati. Warga negara yang diharapkan mendapatkan representasi yang sesuai dengan kepentingan mereka, sering kali harus menerima kandidat yang memiliki hubungan keluarga dengan petahana.

Budaya politik dinasti berdampak pada efektivitas pemerintahan. Ketika pejabat yang terpilih lebih karena hubungan keluarga dibandingkan kualifikasi dan kapabilitas, maka kualitas pengambilan keputusan menjadi terpengaruh. Dalam beberapa kasus, dinasti politik memprioritaskan kepentingan keluarga mereka di atas kepentingan publik. Misalnya, keputusan-keputusan strategis terkait pembangunan, pendidikan, dan kesehatan sering kali lebih menguntungkan kepentingan pribadi atau kelompoknya. Selain itu, anggaran dan sumber daya negara berisiko disalahgunakan demi menjaga pengaruh politik keluarga, yang

pada akhirnya berdampak pada penurunan kualitas pelayanan publik. Akumulasi praktik semacam ini memperlihatkan bagaimana dinasti politik merusak integritas pemerintahan dan mengikis kepercayaan publik terhadap institusi demokrasi.

Pengaruh buruk lainnya dari politik dinasti adalah potensi korupsi yang lebih besar. Kekuasaan yang terpusat pada satu keluarga cenderung meningkatkan risiko penyalahgunaan wewenang, seperti korupsi dan nepotisme. Keluarga yang memiliki kendali kuat dalam pemerintahan berpotensi memanfaatkan posisinya untuk memperkaya diri atau kelompok mereka. Selain itu, karena hubungan erat antaranggota keluarga, pengawasan terhadap kebijakan dan tindakan para pejabat tersebut menjadi lebih sulit dilakukan. Hal ini mengurangi transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan yang merupakan salah satu prinsip dasar demokrasi. Di Indonesia, banyak kasus korupsi yang melibatkan anggota keluarga pejabat publik, yang menunjukkan bahwa dinasti politik dapat mendorong lingkungan politik yang lebih rentan terhadap korupsi dan penyelewengan (Sukmariningsih, 2023).

Budaya politik dinasti menghalangi perkembangan generasi baru dalam politik yang memiliki visi dan inovasi yang lebih segar. Sistem dinasti yang berkelanjutan menciptakan semacam hambatan bagi kaum muda atau pihak-pihak yang memiliki potensi untuk membawa perubahan dan ide-ide baru dalam tata kelola pemerintahan. Padahal, demokrasi yang sehat membutuhkan partisipasi yang inklusif dan representasi dari berbagai kalangan masyarakat. Keterbatasan akses bagi generasi baru ini pada akhirnya menghambat regenerasi politik dan berpotensi membuat kebijakan yang diterapkan tidak relevan dengan perkembangan zaman. Dalam jangka panjang, fenomena ini dapat menciptakan ketidakpuasan di kalangan masyarakat dan mengurangi semangat partisipasi politik, karena masyarakat merasa bahwa politik telah menjadi arena tertutup bagi segelintir keluarga atau kelompok tertentu saja.

## **2. Bagaimana peran lembaga negara, partai politik, masyarakat sipil dan media dalam upaya mencegah dan menanggulangi praktik politik dinasti?**

Dalam beberapa dekade terakhir, terutama selama reformasi, praktik politik dinasti di Indonesia telah berkembang menjadi masalah besar. Dinasti politik adalah situasi di mana anggota keluarga tertentu memiliki seluruh kekuasaan politik, yang sering kali mengabaikan gagasan meritokrasi dan demokrasi. Dalam hal ini, media, partai politik, masyarakat sipil, dan lembaga-lembaga resmi memiliki peran penting dalam menghentikan dan memerangi praktik tersebut.

Untuk menghentikan kegiatan politik dinasti, lembaga-lembaga negara yang bertanggung jawab untuk menegakkan keadilan dan integritas dalam tata kelola pemerintahan sangat penting. Menurut penelitian, lembaga-lembaga ini harus menerapkan reformasi hukum yang lebih ketat untuk mencegah terulangnya tindakan-tindakan yang berbahaya bagi demokrasi. Selain itu, lembaga independen yang dibentuk untuk mengawasi pemilu harus memiliki kekuatan dan yurisdiksi untuk memerangi perilaku tidak bermoral seperti nepotisme dan korupsi, yang sering kali terjadi dalam dinasti politik (Siburian, 2023). Oleh karena itu, lembaga-lembaga negara harus bertindak sebagai pemantau proses politik yang transparan dan efisien.

Kewajiban lembaga-lembaga negara untuk menjamin keadilan dan transparansi sistem politik. Lembaga-lembaga negara dapat mengambil sejumlah tindakan, seperti:

- **Pembuatan Kebijakan:** Untuk mengekang praktik politik dinasti, seperti melarang pencalonan kerabat politisi yang sedang menjabat, lembaga legislatif harus membuat undang-undang yang eksplisit.
- **Pengawasan Pemilu:** Untuk menghentikan dinasti politik memanipulasi dan menyalahgunakan wewenang mereka, lembaga pengawas pemilu harus lebih ketat dalam

mengawasi proses pemilu.

- **Penegakan Hukum:** Untuk menjaga integritas sistem politik, penegakan hukum yang tegas terhadap nepotisme dan kegiatan korupsi yang terkait dengan politik dinasti sangat diperlukan.

Selain itu, partai politik sangat penting dalam pembentukan dan pemeliharaan dinasti politik. Menurut penelitian, hubungan kekeluargaan diprioritaskan dan perekrutan kandidat di dalam partai sering kali tersentralisasi, sehingga kandidat yang tidak memiliki hubungan dinasti tidak memiliki banyak pilihan (Fitriyah, 2020). Untuk menjamin kandidat yang dipilih memiliki kompetensi dan integritas, bukan hanya hubungan keluarga dengan elit politik, partai politik harus merombak proses rekrutmen. Oleh karena itu, partai politik harus berdedikasi untuk mengutamakan prinsip meritokrasi dalam proses pencalonan.

Karena partai politik adalah tempat utama untuk mengorganisir para pemimpin masa depan di negara demokrasi, partai politik sangat penting dalam mencegah politik dinasti. Partai-partai politik memainkan peran-peran berikut:

- **Menegakkan kaderisasi yang inklusif:** Partai politik harus menciptakan struktur kaderisasi terbuka yang ditentukan oleh kualifikasi dan kinerja, bukan oleh hubungan kekerabatan atau etnis.
- **Membatasi dominasi keluarga:** Untuk memberikan ruang bagi pemimpin baru yang lebih cakap, partai politik harus menerapkan kebijakan internal yang membatasi dominasi keluarga dalam struktur partai. Membatasi jumlah waktu menjabat atau jumlah anggota keluarga yang dapat menduduki jabatan penting adalah dua contohnya.
- **Membuat kode etik partai:** Di dalam struktur internal partai, partai politik dapat membuat kode etik yang mengatur pembatasan atau pelarangan politik dinasti.

Kewajiban partai politik untuk memperkuat struktur internal mereka agar menjadi lebih terbuka dan demokratis. Memperkuat proses regenerasi untuk menghasilkan pemimpin yang cakap dan tidak hanya mengandalkan hubungan kekeluargaan adalah bagian dari hal ini. Sistem pemilihan umum harus direformasi untuk menjamin bahwa para pemimpin dipilih berdasarkan kemampuan. Dengan demikian, partai politik dapat membantu membangun lanskap politik yang lebih inklusif dan egaliter.

Untuk mengawasi dan meminta pertanggungjawaban partai politik dan lembaga-lembaga negara, masyarakat sipil memainkan peran penting. Menolak metode politik dinasti dapat difasilitasi oleh tingkat pemahaman politik yang tinggi. Menurut penelitian, pengembangan pemilih yang kritis dan cakap sangat bergantung pada pendidikan politik dan partisipasi pemilu (Tunggal, 2023). Media sosial juga dapat digunakan oleh masyarakat sipil untuk mendukung kandidat yang lebih cakap dan terbuka, serta untuk mengekspresikan ketidaksetujuan mereka terhadap dinasti politik. Oleh karena itu, untuk mendorong perubahan yang konstruktif, masyarakat sipil perlu dilibatkan dalam proses politik.

Masyarakat sipil yang terdiri dari berbagai kelompok dan individu, masyarakat sipil memainkan peran penting dalam mengamati dan memajukan transformasi sosial dan politik.

- **Pendidikan dan advokasi publik:** Organisasi masyarakat sipil dapat membantu memberikan informasi kepada publik tentang ancaman yang ditimbulkan oleh politik dinasti terhadap demokrasi. Selain itu, mereka dapat melakukan kampanye untuk mendorong para pemilih agar lebih berhati-hati dalam memilih kandidat yang bebas dari nepotisme.
- **Gerakan sosial:** Untuk menuntut reformasi kebijakan yang berkaitan dengan praktik politik dinasti dan untuk memberikan tekanan kepada pemerintah dan partai politik untuk melakukan reformasi, masyarakat sipil dapat mengorganisir gerakan sosial.

- Organisasi masyarakat sipil dapat berfungsi sebagai pengawas dengan mengawasi kegiatan politik dinasti dalam pemerintahan atau selama pemilihan umum.

Media, sebagai pilar demokrasi, memiliki tanggung jawab untuk menginformasikan dan mengedukasi masyarakat tentang konsekuensi negatif dari praktik politik dinasti. Media harus berperan sebagai pengawas, mengawasi dan melaporkan tindakan-tindakan yang berbahaya bagi demokrasi. Media sosial juga dapat dimanfaatkan untuk menyebarkan informasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya memilih pemimpin yang tidak terkungkung oleh ikatan dinasti. Dalam rangka memberikan pencerahan kepada masyarakat mengenai pilihan politik yang lebih baik, media harus berperan sebagai sumber informasi yang tidak memihak (Muhammad & Anggara, 2021).

Dalam hal menyebarkan informasi dan mempengaruhi opini publik, media memiliki kekuatan yang luar biasa, diantaranya yaitu:

- Peran Media dalam Pemantauan: Dengan mendokumentasikan dan mengekspos kegiatan politik dinasti yang terjadi di dalam partai politik atau pemerintah, media dapat menjadi alat pengawasan publik.
- Pendidikan dan Penyuluhan: Media juga dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang nilai demokrasi yang bebas dari politik dinasti dan nepotisme, serta pentingnya memilih pemimpin berdasarkan kualifikasi dan riwayat kinerja mereka.
- Investigasi dan Laporan Khusus: Dengan mengekspos kegiatan yang meragukan selama pemilihan atau pencalonan, media investigasi dapat memberi informasi kepada publik dan pihak berwenang.

Dengan melibatkan media dalam upaya ini, masyarakat dapat terinspirasi untuk mendasarkan keputusan mereka pada informasi faktual dan bukan hanya pada nama atau sejarah keluarga. Politik dinasti merupakan ancaman yang signifikan bagi demokrasi Indonesia. Lembaga-lembaga negara, partai politik, masyarakat sipil, dan media harus bekerja sama untuk menghindari dan mengatasi masalah ini. Setiap komponen berperan dalam membangun sistem pemerintahan yang lebih terbuka, adil, dan akuntabel. Diyakini bahwa dengan bekerja sama, Indonesia akan mampu memperkuat basis demokrasinya dan mengurangi dampak buruk dari praktik politik dinasti.

## **SIMPULAN**

kerja sama dari berbagai pihak, termasuk lembaga-lembaga negara, partai politik, masyarakat sipil, dan media. Lembaga negara perlu membuat kebijakan yang melarang praktik politik dinasti, memperkuat pengawasan pemilu, serta pengaruh budaya politik dinasti terhadap kualitas demokrasi di Indonesia adalah bahwa politik dinasti memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap demokrasi di Indonesia. Politik dinasti menciptakan lingkungan politik yang tidak kompetitif dan monopolistik, menghambat regenerasi politik, serta mengurangi kesempatan bagi kandidat yang kompeten di luar lingkup keluarga penguasa. Praktik ini cenderung memprioritaskan hubungan kekeluargaan dibandingkan meritokrasi, yang berdampak pada menurunnya kualitas pengambilan keputusan, peningkatan potensi korupsi, serta penyalahgunaan wewenang. Selain itu, dinasti politik menghambat keterlibatan generasi baru dengan ide-ide segar dalam pemerintahan.

Untuk menangani dampak politik dinasti, diperlukan menegakkan hukum yang tegas terhadap nepotisme dan korupsi. Partai politik perlu menerapkan sistem kaderisasi inklusif dan mengutamakan meritokrasi dalam proses rekrutmen kandidat. Masyarakat sipil berperan dalam mengedukasi dan mengadvokasi publik untuk menolak politik dinasti, sementara media berfungsi sebagai pengawas dan penyebar informasi yang objektif. Kolaborasi ini diharapkan dapat membangun sistem pemerintahan yang lebih adil,

transparan, dan akuntabel, serta memperkuat demokrasi di Indonesia.

### **Saran**

Saran yang dapat peneliti berikan secara praktis untuk mencegah terjadinya dinasti politik yaitu:

1. menguatkan peran yang dimainkan oleh lembaga negara, partai politik, masyarakat sipil, dan media dalam mencegah dan menghentikan praktik dinasti politik.
2. meningkatkan pengawasan dan fungsi dari rakyat sebagai kedudukan tertinggi.
3. memperbaharui aturan-aturan hukum yang berlaku untuk membatasi ruang gerak dari politik dinasti. Adanya undang - undang yang mengatur tentang dinasti politik yang membatasi perpanjangan periode jabatan yang berasal dari keluarga yang sama untuk menghindari terjadinya penyelewangan kekuasaan.
4. Adanya pengawasan dan penegakan hukum bagi pelanggaran pemilu untuk mencegah terjadinya politik dinasti yang berkelanjutan.
5. Membuat aturan yang langsung dikomandoi oleh rakyat untuk mengawasi praktek – praktek dinasti politik yang memanfaatkan fasilitas publik untuk kepentingan politik

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Maulia, S. T. (2024). Politik Dinasti dalam Perspektif Demokrasi di Indonesia. *Journal of Practice Learning and Educational Development*, 4(2), 118-125.
- Sukmariningsih, R. M. (2023). Pengaruh Politik Dinasti dalam Pemilihan Kepala Daerah terhadap Keberlangsungan Demokrasi di Indonesia. *Jurnal Suara Pengabdian* 45, 2(4), 53-69.
- Siburian, H. K. (2023). Fenomena problematika lahirnya lembaga indenpenden. *Journal Evidence of Law*, 2(1), 40-47. <https://doi.org/10.59066/jel.v2i1.241>
- Rahma, A. A., Oktaviani, A. A., Hofifah, A., Ahda, T. Z., & Nugraha, R. G. (2022). Pengaruh dinasti politik terhadap perkembangan demokrasi Pancasila di Indonesia. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(1), 2260-2269.
- Azzahra, F., & Sukri, I. F. (2022). Politik Dinasti Dalam Pemilihan Kepala Daerah: Persimpangan Antara Hak Asasi dan Demokrasi. *Japhtn-Han*, 1(1), 105-119.
- Maydani, R., Husna, M. F., Winarti, S. L., Harahap, N., & Ardiansyah, A. (2024). Politik Dinasti di Negara Demokrasi. *Jurnal Syntax Admiration*, 5(3), 950-955.
- Fitriyah, F. (2020). Partai politik, rekrutmen politik dan pembentukan dinasti politik pada pemilihan kepala daerah (pilkada). *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 11(1), 1-17. <https://doi.org/10.14710/politika.11.1.2020.1-17>
- Pascal Wilmar Yehezkiel Toloh. (2023). Politik Hukum Penguatan Partai Politik Untuk Mewujudkan Produk Hukum Yang Demokratis. *JAPHTN-HAN*, 2(1), 141–168. <https://doi.org/10.55292/japhtnhan.v2i1.60>
- Sasana Tunggal (2023). Membangun kesadaran politik warga negara melalui pendidikan kewarganegaraan. *JOCER: Journal of Civic Education Research*, 1(1), 11-15. <https://doi.org/10.60153/jocer.v1i1.9>
- Maydani, R., Husna, M. F., Winarti, S. L., Harahap, N., & Ardiansyah, A. (2024). Politik Dinasti di Negara Demokrasi. *Jurnal Syntax Admiration*, 5(3), 950-955.
- Rahma, A. A., Oktaviani, A. A., Hofifah, A., Ahda, T. Z., & Nugraha, R. G. (2022). Pengaruh dinasti politik terhadap perkembangan demokrasi Pancasila di Indonesia. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(1), 2260-2269.
- Muhammad, H. A., & Anggara, D. (2021). Fenomena Konstruksi Politik Dinasti pada Pilkada Serentak Tahun 2020 di Kabupaten Batang Hari. *Sospol*, 7(2), 161–175. <https://doi.org/10.22219/sospol.v7i2.15160>
- Maydani, R., Husna, M. F., Winarti, S. L., Harahap, N., & Ardiansyah, A. (2024). Politik Dinasti di Negara Demokrasi. *Jurnal Syntax Admiration*, 5(3), 950-955.
- Arifah, Y. N., Khasanah, D. M., Yuliana, C. G., Ghafur, A. F., Fernanda, N., Arifin, R. A., & Hadji, K. (2024). Kontribusi Partai Politik Terhadap Pembangunan Demokrasi Dalam Perspektif Hukum Tata Negara. *Amandemen: Jurnal Ilmu pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia*,

1(3), 26-43.